



**ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DAN KETERGANTUNGAN  
FISKAL DI PROVINSI NTB PRIODE 2019-2023**

*Analysis Of Fiscal Independence And Fiscal Dependence In Ntb Province In  
The 2019-2023 Period*

**Lale Ria Aryan**

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB**

**Email: laleriaaryani16@gmail.com**

**Abstract**

*This study analyzes the dynamics of fiscal independence and fiscal dependence in West Nusa Tenggara (NTB) Province during the 2019–2023 period within a fiscal decentralization framework that requires local governments to strengthen their own revenue capacity while simultaneously managing the dominance of intergovernmental transfers. The study focuses on a more comprehensive understanding of changes in the regional revenue structure through three commonly used financial performance indicators: the Regional Independence Ratio (RKD), the Degree of Fiscal Decentralization (DDF), and the Transfer Dependence Ratio. Unlike descriptive ratio studies that tend to focus on a single indicator or ignore the financing component, this study emphasizes the RKD, which includes loans as a comparative measure (transfers + loans) to avoid biased interpretations of independence due to the use of short-term financing. The method used is a descriptive quantitative approach based on data processing from the NTB Provincial Government's Budget Realization Report/LKPD for 2019–2023. The analysis is conducted by calculating annual trends in the three ratios and interpreting changes in the central-regional relationship pattern using the RKD intervals (instructive, consultative, participatory, and delegative). This approach allows for a simultaneous understanding of strengthening Locally-Owned Revenue (PAD), changes in the portion of transfers, and the role of loans in shaping regional fiscal space. The results indicate an improvement in NTB's internal fiscal capacity during the observation period. The Regional Original Revenue (RKD) increased from 49.58% (2019) to 92.76% (2023), indicating that financing is increasingly supported by PAD. The Regional Debt-to-Debt (DDF) also increased from 33.15% to 48.12%, indicating a larger contribution of PAD to total revenue (PAD + transfers), although it has not yet exceeded the 50% threshold. Correspondingly, the dependency ratio decreased from 66.85% (2019) to 51.88% (2023), indicating a weakening of transfer dominance and a shift toward a more balanced revenue structure. However, annual dynamics show that changes are not always linear; in 2021, the RKD decreased slightly despite an increase in PAD due to loans increasing the denominator (transfers + loans), while the 2023 spike was relatively analytically "clean" because loans were zero. Interpretatively, NTB shifted from a consultative model (2019) to a participatory one (2020–2022) and then to a delegative one (2023). This finding underscores the urgency of strengthening the regional original revenue (PAD) base through continuous intensification and extensification, while managing transfer dependence as a fiscal risk to changes in regional allocation (TKDD) policies. The novelty of this research lies in the integration of three ratios within the provincial locus, emphasizing the role of loans in reading the Regional Budget (RKD), and linking ratio trends to central-regional relationship patterns to enrich policy implications.*

**Keywords:** *fiscal independence; degree of fiscal decentralization; transfer dependence; PAD; NTB Province; LKPD*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis dinamika kemandirian fiskal dan ketergantungan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2019–2023 dalam kerangka desentralisasi fiskal yang menuntut pemerintah daerah memperkuat kapasitas pendapatan sendiri sekaligus mengelola dominasi transfer antarpemerintah. Fokus kajian diarahkan untuk membaca perubahan struktur pendapatan daerah secara lebih utuh melalui tiga indikator kinerja keuangan yang umum digunakan, yaitu Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), dan Rasio Ketergantungan pada Transfer. Berbeda dari studi deskriptif rasio yang cenderung memotret satu indikator atau mengabaikan komponen pembiayaan, penelitian ini menekankan RKD yang memasukkan pinjaman pada sisi pembandingan (*transfer + pinjaman*) agar interpretasi kemandirian tidak bias oleh penggunaan pembiayaan jangka pendek. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif berbasis pengolahan data Laporan Realisasi Anggaran/LKPD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019–2023. Analisis dilakukan dengan menghitung tren tahunan ketiga rasio dan menafsirkan perubahan pola hubungan pusat–daerah menggunakan interval RKD (*instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif*). Pendekatan ini memungkinkan pembacaan simultan antara penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan porsi transfer, dan peran pinjaman dalam membentuk ruang fiskal daerah. Hasil menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal internal NTB selama periode pengamatan. RKD meningkat dari 49,58% (2019) menjadi 92,76% (2023), yang mengindikasikan bahwa pembiayaan semakin ditopang oleh PAD. DDF juga naik dari 33,15% menjadi 48,12%, menandakan kontribusi PAD terhadap total pendapatan (*PAD + transfer*) makin besar meskipun belum melampaui ambang 50%. Sejalan dengan itu, rasio ketergantungan menurun dari 66,85% (2019) menjadi 51,88% (2023), yang berarti dominasi transfer melemah dan struktur pendapatan bergerak mendekati komposisi yang lebih seimbang. Namun, dinamika tahunan memperlihatkan perubahan tidak selalu linier; pada 2021 RKD turun tipis meski PAD meningkat karena pinjaman memperbesar penyebut (*transfer + pinjaman*), sedangkan lonjakan 2023 relatif “bersih” secara analitik karena pinjaman bernilai nol. Secara interpretatif, NTB bergeser dari pola konsultatif (2019) menuju partisipatif (2020–2022) dan mencapai delegatif (2023). Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan penguatan basis PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkelanjutan, sembari mengelola ketergantungan transfer sebagai risiko fiskal terhadap perubahan kebijakan TKDD. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tiga rasio secara terpadu pada lokus provinsi, penekanan peran pinjaman dalam pembacaan RKD, serta pengaitan tren rasio dengan pola hubungan pusat daerah untuk memperkaya implikasi kebijakan.

**Kata kunci:** *kemandirian fiskal; derajat desentralisasi fiskal; ketergantungan transfer; PAD; Provinsi NTB; LKPD*

### **PENDAHULUAN**

Pengembangan desentralisasi fiskal di berbagai negara mendorong pemerintah subnasional untuk membelanjakan jumlah belanja publik yang signifikan, terutama untuk layanan dasar dan infrastruktur. Kapasitas pendapatan asli daerah menjadi komponen utama keberlanjutan fiskal lokal (OECD, 2024). Selain itu, ada bukti lintas-negara yang menunjukkan bahwa desentralisasi menghasilkan hasil sosial yang lebih baik di negara-negara dengan tata kelola yang baik, sehingga penguatan kapasitas fiskal lokal harus dipertimbangkan secara bersamaan. (Nakatani, R., Zhang, Q., & Garcia Valdes, I. 2022).

Secara teoretis, argumen tentang efisiensi desentralisasi berasal dari theorem desentralisasi, yang menekankan bahwa pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan preferensi warga yang berbeda. Dengan asumsi bahwa skala ekonomi dan eksternalitas antardaerah dapat dikendalikan (Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. 2017), kerangka pilihan publik lokal juga menempatkan mobilitas dan preferensi warga sebagai mekanisme disiplin kebijakan, sehingga kemandirian pendapatan menjadi prasyarat untuk akuntabilitas fiskal (Tiebout, C. M. 1956). Namun, dalam praktik, banyak sistem desentralisasi menghadapi vertical fiscal imbalance ketika belanja terdesentralisasi lebih cepat daripada kemampuan pendapatan sendiri, sehingga transfer antarpemerintah menjadi sumber dominan pembiayaan dan berpotensi melemahkan insentif mobilisasi PAD (Lewis, B. D., & Smoke, P. 2017). Literatur intergovernmental grants juga menyoroti anomali respons belanja yang lebih “melekat” pada dana transfer dibanding pendapatan warga, yang dikenal sebagai flypaper effect, dan ini sering dikaitkan dengan problem insentif serta desain transfer (Inman, R. P. 2008).

Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang hubungan fiskal antarpemerintah menunjukkan bahwa transfer dapat mempengaruhi perilaku pemerintah daerah melalui insentif dan respons yang tidak selalu sejalan dengan penguatan pendapatan sendiri (Lewis, B. D., & Smoke, P. 2017), sehingga pengukuran kemandirian fiskal perlu dimasukkan ke dalam arsitektur transfer. Pada saat yang sama, pemerataan fiskal melalui instrumen seperti dana alokasi umum berfungsi untuk mengurangi sebagian ketimpangan kapasitas, tetapi disparitas dan masalah desai tetap menjadi masalah. (Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga indikator yang lazim dipakai dalam analisis kinerja keuangan daerah, yakni rasio kemandirian daerah (RKD), derajat desentralisasi fiskal (DDF), dan rasio ketergantungan pada transfer, untuk membaca struktur pendapatan sekaligus pola ketergantungan fiskal. RKD dan DDF dipahami sebagai ukuran kapasitas pendapatan sendiri dan kontribusi PAD terhadap pendapatan, sedangkan rasio ketergantungan menilai dominasi transfer dalam APBD yang secara substantif merefleksikan tingkat kerentanan terhadap perubahan kebijakan transfer.

Meski penelitian kinerja keuangan daerah di Indonesia terus berkembang, riset 5 tahun terakhir masih didominasi studi deskriptif berbasis rasio pada level kabupaten/kota atau provinsi lain, misalnya analisis kemandirian dan efektivitas di Kota Bandung periode 2020–2024 yang menekankan pembacaan tren rasio tanpa pendalaman implikasi desain transfer dan pembiayaan. (Siti Nur Fadhilah Nasution, Annisa Syahrani, dkk.2025) Selain itu, studi tentang pengaruh atau dominasi transfer sering bergerak pada ranah perilaku belanja (flypaper) atau relasi PAD dan belanja, sehingga belum banyak yang secara eksplisit mengintegrasikan tiga indikator pendapatan sekaligus untuk membaca transisi struktur pendapatan dan risiko ketergantungan pada lokus provinsi tertentu. (Alvaro, R. 2022).

Pentingnya penelitian ini adalah untuk membaca secara lebih tajam ketahanan fiskal daerah. Tren "RKD naik, DDF naik, ketergantungan turun" dapat menunjukkan peningkatan kapasitas, tetapi tetap menyisakan risiko jika ketergantungan transfer masih sekitar separuh dan tetap sensitif terhadap perubahan formula dan kebijakan transfer, terutama di daerah dengan basis pajak yang berbeda. (1) Menguji lokus Provinsi NTB dengan interval waktu 2019–2023 menggunakan pendekatan tiga rasio secara terpadu, (2) menekankan RKD yang

memperhitungkan pinjaman untuk interpretasi kemandirian yang lebih akurat, dan (3) mengaitkan perubahan rasio dengan pola hubungan pusat-daerah (konsultatif, partisipatif, dan delegatif) untuk meningkatkan implikasi kebijakan penguatan PAD tanpa mengabaikan fungsi pemerataan transfer.

## METODE

Metode kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif digunakan dalam studi ini dan berfokus pada *Analisis Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal* bertujuan memberikan gambaran lebih mendetail dari data primer dan sekunder di lokus penelitian. Penelitian pada lokus dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data LKPD Provinsi NTB Periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan dikaitkan dengan temuan temuan empirik yang terdapat pada studi studi terdahulu.

### Rasio Kemandirian Daerah/Fiskal

Nilai kemandirian daerah bervariasi dari nol hingga satu, yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran dibiayai dari transfer serta tidak ada peran dari PAD, dan satu, yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran dibiayai oleh PAD dan tidak ada peran dari PAD. Akibatnya, perolehan yang rendah Nilai RKD menunjukkan bahwa daerah kurang mandiri, tetapi nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah sudah mandiri (Sampurna, 2018).

$$RKD = \frac{PAD}{Transfer+Pinjaman} \times 100\%$$

**Tabel 1 Interpretasi dan pola hubungan berbasis RKD**

No	Interval RKD	Kemampuan Keuangan	Keterangan
1	0 – 25%	Rendah Sekali	Instruktif (Pusat dominan)
2	25 – 50 %	Rendah	Konsultatif
3	50 – 75 %	Sedang	Partisipatif
4	75 – 100 %	Tinggi	Delegatif (Daerah relatif mandiri)

Sumber: Utomo, M. A. S. (2015), Mahmudi (2016)

### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dengan menghitung rasio desentralisasi, dapat mengetahui seberapa baik kemampuan keuangan daerah untuk menggali, mengelola, dan mengelola keuangan mereka sendiri sebagai daerah otonom. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah lebih besar.

$$DDF = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

**Tabel 2 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

No	Derajat Desentralisasi	Kategori
1	0 – 10	Sangat Kurang
2	10 - 20	Kurang
3	20 - 30	Sedang
4	30 - 40	Cukup

5	40 - 50	Baik
6	Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Utomo, M. A. S. (2015), Mahmudi (2016)

### **Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan, juga dikenal sebagai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah atau KKD, menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan transfer (dari pemerintah pusat atau provinsi) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio ini secara substantif digunakan untuk mengukur seberapa dominan dana eksternal dalam struktur pendapatan APBD. Nilai rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih bergantung pada transfer dan kontribusi PAD. Akibatnya, Logika ini dijelaskan dalam studi rasio kinerja keuangan daerah sebagai hubungan langsung antara porsi transfer yang tinggi dan ketergantungan yang tinggi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa total penerimaan daerah lebih banyak "ditopang" oleh sumber di luar PAD, yang menunjukkan kemandirian fiskal yang belum kuat. (Abdullah dan Hasan, 2022; Parera, 2023).

$$Ketergantungan = \frac{Transfer}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan adalah analisis laporan keuangan. Analisis ini digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang ditemukan dalam laporan keuangan. Data sekunder yang digunakan untuk menghitung ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi NTB. Gambaran empiris tentang derajat kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tahun 2019 hingga 2023 dengan menggunakan tiga indikator yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan daerah: rasio kemandirian daerah (RKD), derajat desentralisasi fiskal (DDF), dan rasio ketergantungan pada transfer. Rasio kemandirian daerah (RKD) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan fiskal melalui PAD dibanding Namun, kontribusi PAD terhadap pendapatan total daerah digambarkan oleh DDF, dan dominasi transfer dalam struktur pendapatan ditunjukkan oleh rasio ketergantungan. Pendekatan tiga rasio ini memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang perubahan kapasitas fiskal dari sudut pandang struktur pendapatan dan tingkat ketergantungan antar Pemerintah.

Secara umum, peningkatan RKD dan DDF serta penurunan rasio ketergantungan menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal NTB selama periode yang diamati. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja PAD dan perubahan komposisi pendapatan sangat penting untuk meningkatkan ruang fiskal daerah dan mengurangi dominasi transfer sebagai sumber pembiayaan. Karena perubahan rasio tidak selalu bersifat linier, temuan tersebut harus dibahas lebih lanjut. Dinamika transfer, kebijakan intensifikasi atau ekstensifikasi PAD, dan penggunaan pembiayaan (pinjaman) pada tahun tertentu adalah semua faktor yang dapat memengaruhi perubahan rasio. Oleh karena itu, diskusi berikut tidak hanya berfokus pada besaran rasio tetapi juga pada dampak perubahan pola hubungan

pusat daerah dan dampaknya terhadap kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan yang baik.

**Rasio Kemandirian Fiskal**

**Tabel 3 Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi NTB Periode 2019-2023**

PAD (Rp)	Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Total Pendapatan (PAD+Transfer) (Rp)	RKD / Kemandirian Fiskal (PAD/(Transfer+Pinjaman))
1.807.482.745.855	3.645.310.083.800	192.930.900	5.452.792.829.655	49,58%
1.815.690.092.106	3.422.354.916.440	144.568.927	5.238.045.008.546	53,05%
1.888.456.286.096	3.414.313.104.250	187.500.000.000	5.302.769.390.346	52,43%
2.292.065.852.875	2.978.480.323.175	549.292.350.000	5.270.546.176.050	64,97%
2.790.069.455.407	3.007.931.709.650	0	5.798.001.165.057	92,76%

Sumber: data diolah

**Tabel 4 Interpretasi dan pola hubungan berbasis RKD**

Tahun	Interval RKD	Kemampuan Keuangan	Keterangan
2019	49,58%	Rendah	Konsultatif
2020	53,05%	Sedang	Partisipatif
2021	52,43%	Sedang	Partisipatif
2022	64,97%	Sedang	Partisipatif
2023	92,76	Tinggi	Delegatif

Struktur pendapatan Provinsi NTB menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal internal dari 2019 hingga 2023, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan RKD dari 49,58% menjadi 92,76%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan PAD yang konsisten (dari 1,81 T menjadi 2,79 T) dan penurunan dominasi transfer pada beberapa tahun tertentu (terutama pada 2022, ketika transfer turun ke Rp 2,98 T, tetapi kembali naik di 2023). Singkatnya, jarak antara PAD dan transfer semakin dekat, yang mengakibatkan penurunan ketergantungan pembiayaan antara pusat dan provinsi.

Pola hubungan pusat-daerah Tahun 2019 berada pada batas atas kategori konsultatif (25–50%), yang menunjukkan bahwa daerah sudah memiliki basis PAD yang cukup signifikan tetapi transfer masih menjadi penentu utama ruang fiskal. Tahun 2020–2022 masuk kategori partisipatif (50–75%), yang menunjukkan bahwa PAD menjadi lebih penting dalam menopang pendapatan dan posisi fiskal daerah menjadi lebih baik. Tahun 2023 melonjak ke kategori delegatif (75–100%), yang menunjukkan tingkat kemandirian tinggi.

Dari 2019 hingga 2020, RKD meningkat (49,58% menjadi 53,05%) sebagai akibat dari penurunan transfer (Rp 3,65 T menjadi Rp 3,42 T), sementara PAD meningkat secara relatif stabil. Ini menunjukkan peningkatan kemandirian yang didorong oleh perubahan komponen transfer daripada lompatan PAD.

Dinamika yang dapat dilihat diantaranya pada tahun 2019 → 2020: RKD naik (49,58% → 53,05%) karena transfer turun (Rp 3,65 T → Rp 3,42 T) sementara PAD relatif stabil naik tipis. Ini menggambarkan kenaikan kemandirian yang lebih banyak didorong oleh perubahan komponen transfer, bukan lompatan PAD. Tahun 2021 RKD turun tipis (53,05% → 52,43%) walau PAD naik, karena pinjaman besar (Rp 187,5 M) memperbesar “beban” di penyebut (transfer + pinjaman). Artinya,

pembiayaan melalui pinjaman dapat menahan laju peningkatan rasio kemandirian. Tahun 2022 RKD naik cukup kuat (52,43% → 64,97%) karena PAD naik signifikan (Rp 2,29 T) dan transfer menurun (Rp 2,98 T), meskipun pinjaman juga meningkat (Rp 549,29 M). Ini menandakan penguatan PAD tetap mampu memperbaiki kemandirian meski ada tambahan pembiayaan. Tahun 2023 RKD melonjak tajam (64,97% → 92,76%) karena PAD naik besar (Rp 2,79 T) dan pinjaman nol, sementara transfer relatif stabil (Rp 3,01 T). Lonjakan ini paling bersih menggambarkan penguatan kemandirian karena tidak terdistorsi oleh pinjaman.

### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

**Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi NTB Periode 2019-2023**

Tahun	PAD (Rp)	Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Total Pendapatan (PAD+Transfer) (Rp)	DDF (PAD/Total Pendapatan)
2019	1.807.482.745.855	3.645.310.083.800	192.930.900	5.452.792.829.655	33,15%
2020	1.815.690.092.106	3.422.354.916.440	144.568.927	5.238.045.008.546	34,66%
2021	1.888.456.286.096	3.414.313.104.250	187.500.000.000	5.302.769.390.346	35,61%
2022	2.292.065.852.875	2.978.480.323.175	549.292.350.000	5.270.546.176.050	43,49%
2023	2.790.069.455.407	3.007.931.709.650	0	5.798.001.165.057	48,12%

Sumber: data diolah

DDF NTB menunjukkan tren naik dari 33,15% (2019) menjadi 48,12% (2023). Ini menunjukkan bahwa porsi PAD dalam struktur pendapatan meningkat, yang pada data ini diprosikan sebagai PAD+Transfer. Ini meningkatkan kontribusi sumber pendapatan "milik daerah". Karena PAD yang meningkat dari 2019–2021, DDF naik perlahan dari 33,15% menjadi 35,61%. Transfer tetap besar dan stabil, sehingga perubahan struktur pendapatan tidak signifikan. Pada tahun 2022, ada peningkatan yang signifikan dalam DDF (43,49) karena PAD meningkat tajam (Rp 2,29 T) bersamaan dengan penurunan (Rp 2,98 T), sehingga komposisi pendapatan beralih ke PAD. Pada tahun 2023, DDF kembali meningkat menjadi 48,12% karena PAD terus meningkat (Rp 2,79 T), meskipun transfer turun lagi (Rp 3,01 T); ini menunjukkan bahwa penguatan DDF terutama didorong oleh peningkatan PAD yang lebih cepat daripada kenaikan transfer. Secara substansial, peningkatan DDF ke 50% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa NTB sedang memasuki fase transisi menuju struktur pendapatan yang lebih seimbang. Namun, karena DDF belum melampaui 50%, transfer masih sedikit lebih dominan daripada PAD, sehingga agenda untuk memperkuat basis PAD masih sangat penting untuk mempertahankan otonomi fiskal yang berkelanjutan.

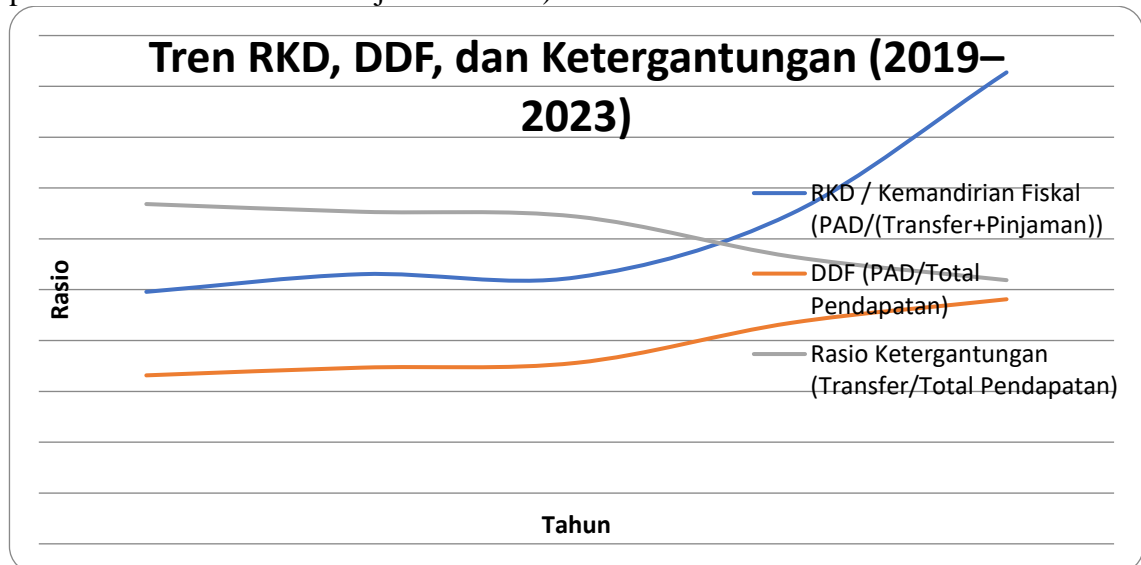
### Rasio Ketergantungan

Tahun	PAD (Rp)	Transfer (Rp)	Pinjaman (Rp)	Total Pendapatan (PAD+Transfer) (Rp)	Rasio Ketergantungan (Transfer/Total Pendapatan)
2019	1.807.482.745.855	3.645.310.083.800	192.930.900	5.452.792.829.655	66,85%
2020	1.815.690.092.106	3.422.354.916.440	144.568.927	5.238.045.008.546	65,34%
2021	1.888.456.286.096	3.414.313.104.250	187.500.000.000	5.302.769.390.346	64,39%
2022	2.292.065.852.875	2.978.480.323.175	549.292.350.000	5.270.546.176.050	56,51%
2023	2.790.069.455.407	3.007.931.709.650	0	5.798.001.165.057	51,88%

Dari 2019, rasio ketergantungan NTB turun dari 66,85% menjadi 51,88% pada 2023. Ini menunjukkan bahwa pada 2019, sekitar dua pertiga total pendapatan (diprosikan sebagai PAD+transfer) masih dibantu oleh transfer. Namun, pada 2023, porsinya hampir setengah. Penurunan ini secara substansial menunjukkan

bahwa struktur pendapatan semakin seimbang: kontribusi PAD meningkat dan dominasi transfer mulai "mengeser", menurunkan ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ketergantungan yang tinggi dalam hubungan fiskal antarpemerintah biasanya menunjukkan keterbatasan kapasitas pendapatan sendiri dan kemungkinan kerentanan terhadap perubahan kebijakan transfer; oleh karena itu, tren penurunan merupakan sinyal perbaikan menuju kemandirian yang lebih kuat.

Jika dibaca per tahun, penurunan pada 2019–2021 relatif gradual (66,85% → 64,39%), mencerminkan bahwa transfer masih dominan sementara PAD hanya naik moderat. Perubahan yang lebih tajam terjadi pada 2022 ketika rasio turun ke 56,51%; ini selaras dengan kondisi pada data Anda: PAD meningkat signifikan (Rp 2,29 T) bersamaan dengan transfer menurun (Rp 2,98 T), sehingga porsi transfer dalam total pendapatan mengecil. Pada 2023, ketergantungan turun lagi ke 51,88% meski nilai transfer naik (Rp 3,01 T), karena PAD tumbuh lebih cepat (Rp 2,79 T), membuat komposisi pendapatan semakin "mendekati 50:50". Implikasinya, penguatan PAD menjadi faktor kunci yang mendorong penurunan ketergantungan, bukan semata karena transfer berkurang; dengan kata lain, NTB mulai bergerak dari ketergantungan "tinggi" menuju tingkat yang lebih moderat, walau transfer masih tetap komponen besar yang perlu dikelola sebagai risiko fiskal (misalnya risiko perubahan formula atau kebijakan TKDD).



Kemandirian fiskal (RKD) meningkat, derajat desentralisasi fiskal (DDF) meningkat, dan ketergantungan pada transfer berkurang, menurut grafik tren 2019–2023. Secara struktur, kombinasi tiga indikator ini biasanya digambarkan sebagai pergeseran komposisi pendapatan daerah ke arah yang lebih "ditopang" PAD. Akibatnya, ruang fiskal daerah cenderung lebih fleksibel dalam mengatur prioritas belanja. Hasil seperti ini sejalan dengan bukti empiris berbasis data panel yang menunjukkan bahwa perbaikan kinerja keuangan atau efisiensi pemerintah daerah berkorelasi dengan penguatan PAD dan pengelolaan transfer yang lebih proporsional (Putri et al 2025).

RKD (garis biru) mengalami kenaikan paling tajam, dengan peningkatan yang signifikan menjelang 2023. Secara analitik, peningkatan RKD menunjukkan

bahwa PAD tumbuh lebih cepat daripada "penopang eksternal" (transfer dan, dalam definisi RKD, juga pinjaman). Di Indonesia, transfer dominan sering dibahas dalam studi tentang hubungan fiskal antarpemerintah karena berpotensi membentuk insentif yang kurang kuat bagi mobilisasi pendapatan sendiri. Oleh karena itu, peningkatan RKD dapat ditafsirkan sebagai indikasi bahwa kemampuan fiskal internal mulai berperan lebih besar dalam mendukung pendanaan daerah. (Lewis & Smoke, tahun 2017).

Garis oranye menunjukkan DDF yang meningkat, yang menunjukkan porsi PAD dalam "kue" pendapatan meningkat, mendekati separuh total pendapatan (PAD+transfer). Namun, DDF yang meningkat belum menunjukkan dominasi penuh PAD, karena masih di bawah 50%. Dalam konteks empiris, beberapa penelitian menemukan bahwa peningkatan PAD cenderung terkait dengan indikator kinerja dan kapasitas fiskal daerah yang lebih baik. Namun, transfer tetap berfungsi sebagai penyangga, terutama di daerah dengan basis pajak yang terbatas. Dengan kata lain, tren DDF yang meningkat mendukung cerita penguatan pendapatan sendiri; namun, itu juga menunjukkan bahwa, tanpa benar-benar memperkuat dasar kemandirian, strategi penguatan PAD tidak boleh berhenti pada fase "mendekati seimbang". (Aswar, 2019; Putri, 2025).

Meskipun dominasinya berkurang, rasio ketergantungan (garis abu-abu) turun dari sekitar dua pertiga ke hampir separuh, menunjukkan bahwa transfer masih penting. Ini penting karena penelitian tentang belanja daerah di Indonesia sering menekankan efek flypaper, yaitu kondisi di mana belanja daerah merespons dana transfer lebih kuat daripada pendapatan sendiri. Gejala ini sering digunakan sebagai salah satu alasan mengapa, meskipun PAD meningkat, daerah masih kesulitan keluar dari ketergantungan struktural. Oleh karena itu, penurunan ketergantungan pada grafik dapat dianggap sebagai sinyal yang positif. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat belanja untuk mengetahui apakah penurunan ketergantungan benar-benar diikuti oleh perubahan perilaku fiskal, seperti peningkatan dukungan PAD untuk belanja, atau hanya perubahan komposisi pendapatan tanpa perubahan pola respons belanja. (Syahrina dan Ermawati, 2020).

Dalam konteks yang lebih luas, pola "RKD naik, DDF naik, ketergantungan turun" juga dapat digunakan untuk memahami masalah ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah. Bukti empiris menunjukkan bahwa struktur basis pajak dan distribusi sumber penerimaan bersama dapat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal di Indonesia. Akibatnya, tidak selalu mudah untuk meningkatkan PAD di satu wilayah di wilayah lain. Oleh karena itu, tren yang meningkat pada grafik harus dimasukkan ke dalam konteks: kebijakan yang meningkatkan basis ekonomi lokal dan kepatuhan pajak harus mempertahankan kemandirian fiskal dan tetap mempertimbangkan fungsi transfer sebagai alat pemerataan (Akita 2021; Lewis & Smoke, 2017).

## **KESIMPULAN**

Studi ini menemukan bahwa tiga indikator utama kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rasio kemandirian daerah (RKD), derajat desentralisasi fiskal (DDF), dan rasio ketergantungan pada transfer—menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kinerja kemandirian fiskal dari tahun 2019 hingga 2023. Kapasitas pembiayaan berbasis PAD lebih besar dibandingkan

dengan sumber eksternal, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan RKD dari 49,58% (2019) menjadi 92,76% (2023).

Selain itu, peningkatan DDF dari 33,15% (2019) menjadi 48,12% (2023) menunjukkan kontribusi PAD yang lebih besar dalam struktur pendapatan daerah, meskipun masih belum mencapai 50%. Dari perspektif ketergantungan fiskal, temuan utama menunjukkan penurunan rasio ketergantungan dari 66,85% pada tahun 2019 menjadi 51,88% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan NTB semakin seimbang antara PAD dan transfer. Namun demikian, tingkat ketergantungan yang masih berada di sekitar setengah total pendapatan menunjukkan bahwa transfer masih merupakan bagian penting dari ekonomi, dan jika kebijakan atau formula transfer berubah, itu dapat menjadi masalah.

Oleh karena itu, penurunan ketergantungan harus dianggap sebagai tanda perbaikan; namun, ini belum cukup untuk mengatakan bahwa NTB telah terbebas dari risiko ketidakseimbangan fiskal horizontal dalam praktik hubungan pusat-daerah. Karena kombinasi pergerakan PAD, transfer, dan pembiayaan melalui pinjaman, perubahan rasio tidak selalu linier, seperti yang ditunjukkan oleh analisis dinamika tahunan. Tahun 2021 menunjukkan bukti penting bahwa pinjaman (Rp 187,5 miliar) dapat menahan laju peningkatan RKD karena memperbesar komponen pembagi (transfer plus pinjaman). Dengan mempertimbangkan pinjaman, interpretasi kemandirian fiskal menjadi lebih akurat.

Lonjakan RKD pada 2023 menjadi lebih “bersih” secara analitik karena pinjaman bernilai nol, sehingga penguatan kemandirian lebih merefleksikan peningkatan PAD dibanding distorsi pembiayaan. Pola hubungan pusat-daerah di NTB berubah: konsultatif (2019), partisipatif (2020–2022), dan delegatif (2023). Pergeseran ini menunjukkan peran PAD yang lebih besar dalam mendukung pendanaan dan lebih banyak kebebasan fiskal daerah untuk menentukan prioritas belanja. Meskipun demikian, untuk memastikan transisi menuju struktur pendapatan yang benar-benar seimbang dapat dilanjutkan, agenda penguatan basis PAD masih penting karena DDF pada 2023 masih 48,12% dan rasio ketergantungan masih 51,88%.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, kebijakan harus mengadopsi strategi penguatan PAD yang berfokus pada intensifikasi jangka pendek serta ekspansi basis pajak dan retribusi, perbaikan kepatuhan, dan peningkatan kualitas layanan publik untuk meningkatkan legitimasi pemungutan daerah. Pada saat yang sama, transfer tetap harus dipandang sebagai instrumen pemerataan. Ini berarti bahwa fokus kebijakan tidak harus “mengurangi transfer”, tetapi mengelola ketergantungan dengan membuat perencanaan pendapatan yang lebih adaptif dan mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan TKDD. Studi lanjutan dapat memperluas analisis sisi belanja (seperti respons belanja terhadap transfer) dan memeriksa faktor penentu peningkatan PAD dan kualitas pengelolaan fiskal. Ini akan memungkinkan penemuan kemandirian tidak hanya bergantung pada tren rasio tetapi juga menjelaskan mekanisme yang menyebabkannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat ketergantungan keuangan daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208–213.



- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1865.
- Alvaro, R. (2022). Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 130–152.
- Aswar, K. (2019). Financial performance of local governments in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 4(6).
- Inman, R. P. (2008). *The flypaper effect* (NBER Working Paper No. 14579). National Bureau of Economic Research.
- Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365
- Lewis, B. D., & Smoke, P. (2017). Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 38(1), 111–139.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nakatani, R., Zhang, Q., & Garcia Valdes, I. (2022). *Fiscal decentralization improves social outcomes when countries have good governance* (IMF Working Paper WP/22/111). International Monetary Fund.
- OECD. (2024). *Subnational governments and infrastructure finance: 2024 edition*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Parera, J. R. (2023). Analisa peranan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 78–89.
- Putri, A. A. P., Masdar, R., Furqan, A. C., Lucyani, M., & Betty, B. (2025). The effect of regional original revenue (PAD) and transfer funds on the financial efficiency of local governments in Indonesia. *Amkop Management Accounting Review*, 5(2), 1579–1592.
- Rahmasari, N., Murtadho, A., & Rachman, A. (2024). Local finance and regional expenditures: Is there a flypaper effect in Indonesia? *KnE Social Sciences*.
- Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal.
- Septianingrum, A., Putri, N. A., & Rofi', A. (2025). Flypaper effect analysis: Revenue and expenditure of local government in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 26(1), 67–82.
- Siti Nur Fadhilah Nasution, Annisa Syahrani, dkk.(2025) Analysis of Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Growth Ratio in Assessing the Financial Performance of Bandung City Government. *EDUCTUM: Journal Research* Vol. 4, No. 6, November 2025, pp. 226~234.
- Syahrina, D., & Ermawati, E. (2020). Flypaper effect analysis on local government budgets in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4).
- Utomo, M. A. S. (2015). Analisis penggunaan ratio: kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan sebagai alternatif pengukuran kinerja keuangan pada Pemda DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA)*, 2(3), 15–52.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424.